

Coastal Road Harus Prioritas
Plt Kadis PUPR Baru Bahas Masalah, Cari Solusi



Sumber gambar :

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/238/2024/09/03/nipahnipah-1376307750.jpg>

Proyek pembangunan jalan lingkar tepi pantai atau *coastal road* di Penajam, Penajam Paser Utara (PPU) yang sudah dimulai sejak 15 tahun lalu hingga kini belum juga rampung.

PENAJAM – Proyek ambisius yang melewati tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Sei Parit-Kelurahan Nipahnipah-Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan menjadi akses vital menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari Kota Balikpapan dan sekitarnya.

Hal ini bisa terjadi apabila pembangunan Jembatan Tol Penajam-Balikpapan dapat segera diwujudkan. Karena, rencana pembangunan jembatan tol itu dari sisi PPU dimulai dari titik tepi pantai di Kelurahan Nipahnipah, dan sisi Kota Balikpapan di Pantai Melawai.

Anggota DPRD PPU, Sariman, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan proyek ini.

"*Coastal road* ini sangat penting, tak hanya untuk pengembangan Penajam, tapi juga untuk menunjang IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, PPU," kata Sariman, Senin (2/9).

Secara politis, DPRD PPU, kata dia, siap memberi dukungan terhadap pendanaannya melalui APBD PPU. Dia mengatakan, bahwa proyek yang telah menghabiskan anggaran puluhan miliar itu harus jadi prioritas penyelesaiannya.

“Terlebih lagi nanti jalan ini bakal disambungkan dengan pembangunan Jembatan Tol Penajam-Balikpapan, yang titik awalnya mengambil lokasi dari *coastal road* di kawasan Kelurahan Nipahnipah itu,” kata Sariman.

Dia mengatakan, selain dinilai sebagai kebutuhan pengembangan Penajam sebagai Ibu Kota Kabupaten berjudul Bumi Daya Taka ini. Ke depan, lanjutnya, kejenuhan masyarakat, utamanya yang bermukim di IKN Nusantara, dan memerlukan hiburan sangat potensial memanfaatkan *coastal road* untuk selanjutnya melewati Jembatan Tol Penajam menuju Kota Balikpapan, untuk berlibur.

“Nah, untuk menanggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah PPU perlu mengantisipasi dengan meningkatkan kawasan objek wisata yang sekarang ini sudah tersedia pada kawasan *coastal road* itu,” ujarnya.

"Dengan adanya jalan ini, kita bisa menarik lebih banyak wisatawan. Pemerintah daerah harus siap-siap untuk meningkatkan fasilitas wisata di kawasan *coastal road*," tambahnya.

Ia optimistis pembangunan Jembatan Tol Penajam-Balikpapan bisa terwujud. Hal itu, setelah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Muhammad Basuki Hadimoeljono menyinggung tentang pentingnya jembatan ini direalisasikan pembangunannya. Ucapan menteri yang juga merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas Ketua Otorita IKN itu ditegaskannya pada saat ia membuka kegiatan Expo IKN 2024, PPU, Serambi Nusantara, di depan Stadion Panglima Sentik, Penajam, Kamis (15/8).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU dan berakhir pada Minggu (18/8). “Saya yakin pembangunan jembatan tol ini terwujud karena yang berbicara menteri,” kata Sariman.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU, Khairudin, saat dihubungi media ini yang mengonfirmasi tentang pembangunan *coastal road* ini, Senin (2/9) ia mengatakan, apabila dia baru memulai membahasnya dengan melibatkan para pihak internal yang terlibat. “Hari ini (kemarin) baru mau saya bahas dengan teman-teman di PU. Target, permasalahannya dan solusinya seperti apa nantinya, dan saya harus tahu dulu pokok persoalannya,” kata Khairudin yang dilantik jadi Plt kepala DPU PR PPU pertengahan Agustus 2024.

Proyek *coastal road* ini, seperti diberitakan kemarin, mendapatkan sorotan dari Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) PPU, Salehuddin Muin. Kendati sudah dibangun sejak 15 tahun lalu proyek ini belum rampung hingga sekarang. “Kami melihat saat ini Pemkab tidak fokus untuk segera menyelesaikan pembangunan *coastal road* dalam waktu dekat ini. Pertanyaannya lagi, setelah rampung, apakah nanti jalan tersebut dijadikan untuk jalur utama moda transportasi darat, seperti angkutan kota (angkot) dari mana ke mana?” kata Salehuddin Muin, Minggu (1/9).

Kata dia, tidak hanya tampak dari kurang fokusnya penyelesaian pembangunan jalan ini, tetapi ada dampak ikutannya yang belum dirampungkan oleh pemerintah daerah hingga sekarang. Yaitu, ganti rugi atas lahan milik warga yang di atasnya telah dibangun untuk proyek *coastal road* ini. **(far)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, *Coastal Road* Harus Prioritas, Plt Kadis PUPR Baru Bahas Masalah, Cari Solusi, 3/9/2024

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 (PP 39/2023), ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, pengelola, dan/atau pengguna barang dalam proses pengadaan tanah.
3. Dijelaskan dalam Pasal 76 angka 1 PP 39/2023 bahwa ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. Uang;
 - b. Tanah pengganti;
 - c. Permukiman kembali;
 - d. Kepemilikan saham;
 - e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.